

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN MINGGIR, KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Agus Suteja dan Arif Kuncoro Dwi Putranto

Abstract

Raskin program rolled out to help meet the food needs of the poor. This study aims to determine the distribution of Raskin implementation of the program and the factors that influence the distribution of Raskin Program Implementation in the district of Sleman Minggir. This study was descriptive qualitative. Types of data collected are primary and secondary data through observation, interviews and documentation. Mechanical determination informant through purposive sampling, with samples of the District Coordination Team Raskin, Managing Distribution Raskin Village / Sub, RTS-PM Minggir village.

Distribution of Raskin Program Implementation in District Minggir intended to channel aid to poor families who are registered and meet the criteria as Tanggga Home Goal-Beneficiaries (RTS-PM) .Pendistribusian accordance Raskin General Guidelines Distribution of Raskin 2012 with indicators of achieving the target Right on target beneficiaries, right amount, right price, right time, right administration, the right quality. Target accuracy influenced by factors that include two variables, namely the contents of the policy and implementation environment.

Keywords: Implementation, Raskin, Target Households Beneficiaries.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah bangsa Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 penduduk miskin Indonesia sekitar 13,33% atau lebih kurang 31,02 juta jiwa pada bulan Maret 2010, dari jumlah penduduk Indonesia berkisar 237 juta jiwa. Krisis perekonomian Indonesia tahun 1997 berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi secara menyeluruh, khususnya terhadap kesejahteraan penduduk. Pangan merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot hampir 74% pengeluaran. Sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat.

Program Raskin merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rawan pangan agar mereka mendapatkan beras kebutuhan rumah tangga. Dasar program Raskin diatur Inpres No. 9 tahun 2002. Program Raskin melibatkan banyak instansi untuk memperlancar operasional dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, penanggung jawab program Raskin tingkat pusat dan daerah, mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta sosialisasi, penyebaran informasi dan pengaduan keluhan masyarakat.

Menurut Ketua Tim Koordinasi Kabupaten Sleman Yoleistiono Dwi Wasito bahwa jumlah warga miskin di Kabupaten Sleman mencapai 65.157 kepala keluarga atau sekitar 23% dari total warga Sleman sejumlah 283.593 kepala keluarga dengan jumlah RTS-PM Program Raskin di Kecamatan Minggir sebanyak 4.345 KK. Dengan demikian 40,61% dari keseluruhan KK di Kecamatan Minggir sebanyak 10.69 KK. Pendapatan RTS-PM Program Raskin kurang dari Rp. 700.000,00 per bulan dan rata-rata berpendidikan SD atau SMP.

Pendistribusian Program Raskin dilakukan tiap tanggal 9-15 setiap bulannya. Setiap RTS-PM menerima 15 kg beras per bulan dengan harga Rp1.600,00/kg. Prosedur KK miskin untuk di data dan diusulkan menjadi RTS-PM Program Raskin melalui musyawarah Desa dengan tokoh masyarakat dan disertai berita acara. Proses implementasi Program Raskin rentan terhadap penyimpangan. Kebijakan pemerintah memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin sering tidak sesuai dengan harapan seperti tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas serta keterlambatan penyetoran uang hasil pembelian beras kepada Bulog. Oleh karena tema penelitian ini adalah Implementasi Program Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman?

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.

Kajian Literatur

Implementasi

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2002: 65) merumuskan proses implementasi ini sebagai “ *those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diserahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Lebih lanjut Daniel A, Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab, (2002: 65), menjelaskan makna implementasi dengan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Webster’s Dictionary (1979:914), implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*” bersal dari kata “*to implement*” yang artinya pertama,

dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) sebagaimana dikutip oleh Tachjan (2006:24), mengemukakan bahwa, *“implementations as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”*. Maksudnya membawa, melengkapi, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi dimaksudkan sebagai sesuatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian tersebut dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Wayne Parsons mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain, yang pembuatannya tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui (2008:464). Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi merupakan pelaksanaan yang menyangkut pada 3 hal: 1) Ada tujuan, 2) Ada kegiatan pencapaian tujuan dan 3) Ada hasil kegiatan

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yaitu melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan sehingga hasil dari kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diharapkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Teori implementasi kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005: .90-94 dan 99-101) adalah:

1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn
2. Teori Merilee S Grindle
3. Teori George C. Edwards III

Faktor perbedaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari teori-teori tersebut dapat dilihat dalam matriks taksonomi sebagai berikut ini:

Tabel 1
Taksonomi Teori Implementasi Kebijakan

Van Meter & Van Horn	Merilee S.Grindle	George Edward III
Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas	Isi Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Kelompok Sasaran • Tipe Manfaat • Derajat perubahan yang diinginkan • Letak Pengambilan keputusan • Pelaksanaan Program • Sumberdaya 	Komunikasi
Sumberdaya	Lingkungan Implentasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat • Karakteristik lembaga dan penguasa • Kepatuhan dan daya tanggap 	Sumberdaya
<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi Implementor • Karakteristik Badan Pelaksana 		Disposisi
Standar dan sasaran Kebijaksanaan		Struktur Organisasi
Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi		

Dari pemaparan Tabel 1, Teori Edward III menekankan aspek kelembagaan, artinya kesuksesan program tergantung dari lembaga, seperti personil dan kepemimpinannya. Tetapi manajemen program menjadi lemah karena orientasinya pada pengembangan organisasi. Teori Van Meter dan Van Horn fokusnya lebih kompleks, artinya teori ini fokus pada lembaga (organisasi) maupun manajemennya. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi dari Grindle karena tepat diterapkan pada penelitian Program Pendistribusian Raskin. Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2005: 93-94) dipengaruhi dua variabel besar yaitu : Variabel kebijakan mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh **target group**;
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
6. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; dan
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan dituangkan dalam kebijakan sosial. Kebijakan Sosial merupakan keputusan yang diambil secara kolektif dan pilihan Pemerintah dalam wujud sebuah program, misalnya program Bantuan Langsung Tunai, Program Beras Miskin, Program Dana Operasional Sekolah, Program PNPM, Program Rumah Sangat Sederhana dan lain-lain. Dalam

penelitian ini contoh program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam kebijakan sosial adalah program Raskin.

Program Raskin

Program Raskin merupakan bentuk upaya pemerintah menekan kemiskinan pangan karena melalui program ini masyarakat miskin dapat mengakses pangan. Pelaksanaan distribusi dilakukan kelompok kerja (Pokja) Program Raskin di titik distribusi. Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Program Raskin kepada pelaksana distribusi di Desa/Kalurahan atau lokasi lain yang dapat dijangkau RTS-PM, satuan kerja pelaksana distribusi Program Raskin dibentuk oleh Devisi Regional (Divre)/Sub-Devisi Regional (Subdivre)/ Kantor Seksi Logistik (Konsilog) Perum BULOG terdiri dari Ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog.

Indikator Keberhasilan Implementasi Program Raskin

Berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Program Raskin Tahun 2012 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memaparkan indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan pencapaian 6 Tepat, yaitu:

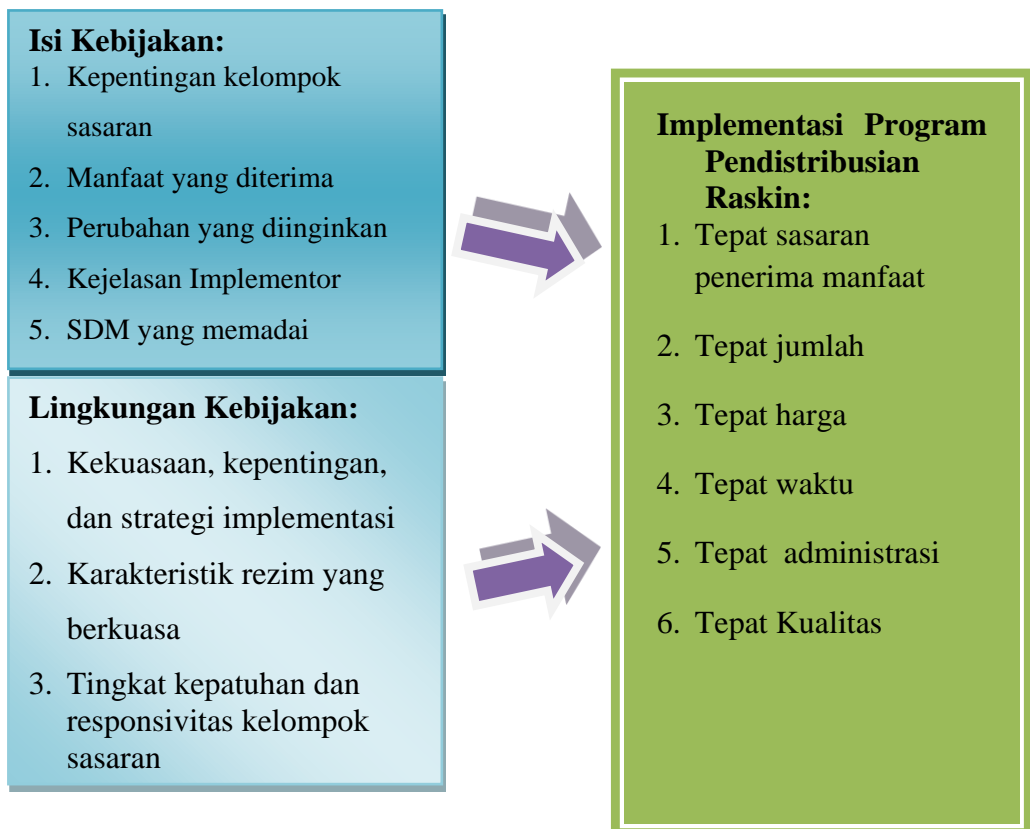
1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Program Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas.
2. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS-PM/Bulan atau 180 Kg/RTS-PM/Tahun.
3. Tepat Harga: Harga tebus beras Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/Kg netto di Titik Distribusi (TD).
4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.

5. Tepat Administrasi: Terpenuhiya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas: Terpenuhiya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

Kerangka Pikir

Implementasi Program Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman dapat digambarkan dalam kerangka pikir seperti dalam gambar 1 :

Gambar. 1
Kerangka Pikir



Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi adalah obyek maupun subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi (Sugiyono,1998: 57). Sesuai dengan judul di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan sejumlah 4 orang, Pelaksana Distribusi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa/Kelurahan sejumlah 17 orang, Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Minggir sebanyak 4.345 kepala keluarga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pemilihan responden untuk tujuan tertentu saja.

Teknik analisa data yang digunakan merupakan analisa data bersifat kualitatif artinya jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strause & Corbin 2003: 4). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah data-data dibaca, dipelajari, ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi-abstraksi rangkuman inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah berikutnya menyusun dalam satuan-satuan kemudian dikategorikan dengan membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, dilanjutkan

tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansi melalui metode tertentu.

Pembahasan

Program Raskin merupakan program Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan meningkatkan akses pangan keluarga miskin.

Sasaran nasional program Raskin tahun 2012 yaitu 17,48 juta RTS-PM sesuai data (PPLS-11) BPS tahun 2011. UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN tahun 2012, ditetapkan subsidi Program Raskin yaitu 17,48 juta RTS-PM dan alokasi 15kg/RTS-PM/bulan selama 12 bulan, harga tebus Rp.1.600,/kg di Titik Distribusi. Inpres No.7 tahun 2009 tentang perberasan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi beras program Raskin. Sebelum tahun 1998 kebijakan pemerintah di bidang perberasan memberikan subsidi beras kepada masyarakat miskin maupun mampu (*general subsidy*). Sejak krisis ekonomi bulan Juli 1998 kebijakan subsidi diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu (*targeted Subsidy*) melalui Operasi Pasar Khusus (OPK), yang berubah menjadi Program Beras Subsidi Untuk Keluarga Miskin (Raskin) tahun 2002.

Kebijakan Implementasi Program Pendistribusian Raskin melibatkan banyak instansi dalam kegiatan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait untuk mencapai target 6 (enam) Tepat.

Tabel 2
RTS-PM kecamatan Minggir

NAMA DESA	JUMLAH RTS-PM
Sendangsari	700
Sendangmulyo	987
Sendangagung	1.278
Sendangarum	322
Sendangrejo	1.058
Jumlah	4.345

Sumber Data: *Bulog Divre Yogyakarta, Korwil Kab.Sleman.*

Implementasi Program Pendistribusian Raskin Di Kecamatan Minggir.

Indikator keberhasilan implementasi program pendistribusian Raskin yaitu tercapainya target **6T** meliputi:

1. Tepat Sasaran

Beras Program Raskin diberikan kepada RTS-PM hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas. Kriteria RTS-PM program Raskin di Kecamatan Minggir sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 21(a) tahun 2008. Selain itu juga disesuaikan dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2012 dan untuk data ketepatan sasaran diperoleh dari data BPS (PPLS-II).

Dari data BPS program Raskin masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jatah beras sehingga pemerintah perlu menambah jumlah paket beras sehingga RTS-PM yang terdaftar data BPS mendapatkan bantuan sesuai Pedoman Umum Pendistribusian Raskin.

2. Tepat Jumlah

Jumlah beras program Raskin sesuai ketentuan yaitu beras kualitas premium dengan jumlah 15kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun. Meski demikian ditemukan pembagian Raskin yang tidak sama karena hasil musyawarah desa dan keberatan keluarga RTS-PM untuk membayar lunas uang tebusan 15 kg beras @ Rp.1.600,00 / kg atau Rp.24.000,00. Sehingga RTS-PM hanya mendapat jatah 7,5kg. Dengan menyadari terbatasnya jumlah paket program Raskin mereka mencoba lapang dada dan berharap pemerintah menambah jumlah paket bantuan program Raskin sehingga semua masyarakat miskin mendapat hak yang sama dengan warga miskin lainnya. Pembagian rata beras program Raskin atau bergiliran KK miskin RTS-PM dengan KK miskin non RTS-PM bertujuan meminimalisasikan kecemburuan sosial.

3. Tepat Harga

Harga tebus Raskin di Kecamatan Minggir sebesar Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa. Hal ini sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Raskin. Petugas yang mengkoordinir pengambilan Raskin di masing –masing dusun dilakukan oleh Kepala Dukuh. Dengan harga yang sesuai diharapkan dapat membantu RTS-PM memenuhi pembelian kebutuhan bahan pangan pokok berupa beras, khususnya pembelian beras bagi warga miskin.

4. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada RTS-PM di Kecamatan Minggir sesuai Rencana Distribusi, berkisar satu minggu dari tanggal 9-15 per bulannya. Pendistribusian dilakukan setelah ada dropping dari BULOG ke Balai Desa. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa memberitahukan kepada Kepala Dukuh untuk disampaikan kepada RTS-PM tentang waktu pengambilan beras program Raskin. Pengambilan Raskin boleh diwakilkan, ke Balai Desa atau tempat yang telah ditunjuk.

5. Tepat Administrasi

Pembayaran uang tebusan beras program Raskin di kecamatan Minggir dilakukan tunai. Warga diberitahu Kepala Dukuh membayar uang tebusan ke Koordinator desa yaitu Kepala Bagian Kemasyarakatan desa sehingga saat beras turun dapat langsung mengambil beras. Titik distribusi pengambilan beras di wilayah kecamatan Minggir dilakukan di Balai Desa, rumah Kepala Dukuh atau rumah pengurus program Raskin lainnya sehingga pelaksanaan pendistribusian segera sampai kepada RTS-PM.

Mekanisme pembagian beras di titik distribusi yaitu RTS-PM memperoleh kartu program Raskin mengambil beras di titik distribusi. Petugas mencocokkan kartu program Raskin dengan daftar yang ada. Jika sesuai dan selesai administrasinya RTS-PM mengambil beras sesuai jumlah

tertera di kartu, kemudian tanda tangan di daftar penerima manfaat yang disediakan petugas.

Setelah pendistribusian selesai, Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa bersama Kepala Dukuh dan petugas lainnya menghitung kembali beras dan jumlah uang tebusan beras untuk satu hari itu. Jika benar-benar sudah selesai, Kepala Bagian Kemasyarakatan menuangkan dalam rekapitulasi berita acara pelaksanaan pelayanan pengambilan beras program Raskin dan melaporkan hasil penerimaan jumlah uang ke Kabupaten Sleman dan mentransfer uang tebusan ke nomor Rekening BULOG.

6. Tepat Kualitas

Kualitas Raskin yang diterima RTS-PM dikatakan kualitas biasa atau cukup. Dalam pemanfaatannya tidak semua warga langsung mengkonsumsi beras tersebut. Ada yang dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih bagus dalam proses memasaknya.

Berdasarkan observasi di lapangan kualitas beras program Raskin dirasa cukup baik. Bukan tidak mungkin kadang kualitas beras ada yang jelek, bau apek, berkutu, hancur, kekuning-kuningan. Kemasan beras di dalam bagor/kantong plastik yang sudah rapi, tiap kemasan tertera isi 15 kg, diproduksi dan didistribusikan BULOG tetapi belum tertera tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsanya beras tersebut.

Kualitas beras termasuk baik jika beras yang diterima masyarakat warnanya putih, tidak bau / apek, tidak berkutu, beras utuh, layak dimakan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas beras untuk menghindari anggapan bahwa KK miskin sulit mengakses pangan dengan kualitas baik karena tidak ada perhatian pemerintah.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Program Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Minggir

Dari hasil penelitian di lapangan, maka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

a. Kepentingan kelompok sasaran

Implementasi Program Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Minggir dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok yaitu beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan, kualitas premium dengan harga tebus Rp.1.600,00 per kilogram netto di titik distribusi.

b. Manfaat yang diterima

Program Raskin bermanfaat bagi rumah tangga miskin, untuk dapat membeli beras mencukupi kebutuhan pokoknya dengan harga murah. Artinya program Raskin meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok bagi keluarga miskin. Jika keluarga miskin dapat subsidi beras dengan harga murah akan memberi kesempatan kepada RTS-PM bahwa hasil kerja dapat digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya

c. Perubahan yang diinginkan

Dengan digulirkannya Program Raskin, pemerintah berharap masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan karena program Raskin bertujuan mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Bantuan program pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, kedepannya untuk mendidik

kemandirian RTS-PM program Raskin yang diwujudkan dalam bentuk menabung atau mendirikan usaha sehingga RTS-PM memiliki kepercayaan diri memperbaiki kesejahteraan hidup dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

d. Kejelasan implementor

Implementasi program Pendistribusian Raskin tingkat Kabupaten Sleman sampai dengan tingkat desa khususnya kecamatan Minggir harus jelas siapa implementornya. Kelancaran pendistribusian beras program Raskin di Kecamatan Minggir didukung seluruh instansi dengan menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi serta koordinasi masing - masing Satuan Kerja (Satker).

e. Sumber daya yang memadai

Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan dan pendistribusian beras tidak hanya terpaut unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen di tingkat Desa, Dusun, RW hingga RT penting artinya untuk menyukseskan Implementasi Program Pendistribusian Raskin. Sumber daya aparatur pemerintah sebagai pelaksana koordinasi dan pelaksana kegiatan menentukan sukses dan tidaknya kebijakan. Petugas harus memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan abdi masyarakat di dalam program pendistribusian Raskin. Kesiapan dan ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya bahan berupa beras yang akan didistribusikan kepada RTS-PM di wilayah kecamatan Minggir akan memperlancar pendistribusian.

2. Lingkungan Kebijakan

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Strategi Implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir adalah Kepala Dukuh, pengurus RW dan pengurus RT dan tokoh masyarakat lainnya, sedangkan Kepala Desa berfungsi sebagai koordinator. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi penting dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian meski pendistribusian Raskin berjalan lancar dengan bantuan dari pengelola di tingkat bawah, namun dari pihak pengelola program Raskin di tingkat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Minggir merasa honorarium dari kabupaten masih rendah sehingga pemerintah kabupaten harus dapat mengambil sikap yang lebih bijaksana lagi.

b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa

Peran pimpinan baik pada tingkat kecamatan, Desa/kelurahan, RW, RT mendukung program Raskin berjalan lancar sesuai kondisi masyarakat. Hal ini terlihat pada strategi program pendistribusian Raskin tiap pedukuhan beda tetapi warga tidak protes karena ada kesepakatan bersama. Prioritas implementasi program pendistribusian Raskin dipahami bahwa pemerintah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan dengan menyediakan bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin.

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kelompok sasaran harus berperan aktif dan mampu menjadi mitra kerja pemerintah sehingga dapat menilai kinerja pemerintah dan memberi masukan terhadap kekurangan untuk diperbaiki sehingga program pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. RTS-PM merespon baik serta antusias terhadap program Raskin serta mematuhi aturan pendistribusian Raskin. Meskipun ada masalah namun dapat dihindarkan dengan sikap tegas para petugas. Selain itu

tanggapan serta kepatuhan dari RTS-PM juga dipengaruhi pelayanan yang baik dari petugas.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan pencapaian 6 Tepat (6T) yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan ditentukan Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Lingkungan kebijakan (*contex of policy*).

Berdasarkan analisa mengenai Implementasi Program Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di kecamatan Minggir bahwa proses pelaksanaan sesuai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang dituang ke dalam buku Pedoman Umum Penyaluran Program Raskin tahun 2012.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Program Pendistribusian Raskin Kecamatan Minggir sesuai Pedoman Umum Penyaluran Program Raskin dalam target **6T** meliputi :
 - a. Tepat Sasaran
Pendistribusian beras program Raskin di kecamatan Minggir sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 21(a) tahun 2008, data PPLS-11 BPS yaitu 4.345 KK merupakan RTS-PM di wilayah Kecamatan Minggir.
 - b. Tepat Jumlah
Jumlah beras program Raskin hak RTS-PM yaitu 15kg/RTS-PM/bulan atau 180kg/RTS-PM / tahun. Masih ada KK miskin

belum terdaftar sebagai RTS-PM program Raskin, pemerintah perlu menambah jumlah paket beras program Raskin.

c. Tepat Harga

Harga tebus beras program Raskin di kecamatan Minggir Rp.1600,00/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa.

d. Tepat Waktu

Pelaksanaan pendistribusian beras program Raskin di wilayah kecamatan Minggir dimulai dari tanggal 9-15 tiap bulannya.

e. Tepat Administrasi

Ketepatan administrasi yaitu tidak terlambat membayar uang tebusan ke rekening BULOG merupakan bentuk dari kedisiplinan RTS-PM.

f. Tepat Kualitas

Kualitas beras program Raskin yang diterima RTS-PM program Raskin di desa Se-Kecamatan Minggir beras kualitas premium.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Minggir:

1. Isi Kebijakan

a) Kepentingan kelompok sasaran

Sasaran kebijakan Implementasi Program Pendistribusian Raskin adalah KK miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM program Raskin.

b) Manfaat yang diterima

Manfaat program Raskin kepada RTS-PM di dalam meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok pangan bagi keluarga miskin.

c) Perubahan yang diinginkan

Pelaksanaan pendistribusian beras program Raskin diharapkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan RTS-PM.

d) Kejelasan implementor

Pelaksanaan Implementasi Program Pendistribusian Raskin di desa se-kecamatan Minggir terlaksana baik karena petugas bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

e) Sumber daya yang memadai

Sumber daya aparatur pemerintah dan ketersediaan bahan berupa beras yang disampaikan kepada RTS-PM di kecamatan Minggir.

2. Lingkungan Kebijakan

a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Kekuasaan dan kewenangan membuat strategi Implementasi Program Pendistribusian Raskin di Kecamatan Minggir yaitu Kepala Dukuh, pengurus RW dan pengurus RT dan tokoh masyarakat lainnya. Kepala Desa berfungsi sebagai koordinator.

b) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa program Raskin membantu RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras.

c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
Tanggapan positif dan kemampuan RTS-PM menjadi mitra dari pemerintah mendukung kelancaran kebijakan implementasi.

Saran

1. Perlu peningkatan pemberian honorarium yang layak bagi petugas pengelola Raskin dari pemerintah kabupaten.
2. Pergantian atau pembaharuan daftar penerima manfaat dilakukan dengan identifikasi dan pendataan melalui musyawarah di tingkat RT, RW dan Pedukuhan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.
3. Jika beras program Raskin yang didistribusikan tidak layak dapat dikirimkan kembali kepada pihak Perum BULOG untuk diganti dengan beras yang layak dikonsumsi RTS-PM.
4. Perlu meningkatkan kemandirian RTS-PM program Raskin untuk membentuk usaha kecil dan menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Daftar Pustaka

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. 2011. ***Data Kependudukan Tahun 2011.***
- Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Sleman. 2011. ***Program Raskin di Kabupaten Sleman.***
- Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. ***Laporan Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2012.***
- Subarsono, AG. 2005. ***Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 1998 . ***Metode Penelitian Administrasi.*** Jakarta : CV Alfabeta.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. ***Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif.*** Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Perundang – Undangan:

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2008 tentang ***Kriteria Penerima Raskin.***
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang ***Perberasan Nasional.***

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. 2012. ***Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah.*** Jakarta.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang ***APBN Tahun 2012.***